

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Ahmad Fawa'id, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2010.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009.
- Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, 2014.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Ibrahim R, *Kepentingan Umum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002.
- O.C. Kaligis & Associates. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung. 2006.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

RM. Surachman, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Negara*, Sinar Grafika, 2012.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Syamsul Anwar , *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* ( Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006)

Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta. 2009

Yusril Ihza Mahendra, *"Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung Dalam sistem Presidensial di bawah UUD 1945*, Jakarta, 2010

## **B. Sumber Lain**

Undang undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan

KUHP ( Kitab Undang Undang Hukum Pidana )

Undang undang No 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi

PP ( Peraturan Pemerintah )

Perkap ( Peraturan Kepolisian )

KUHAP ( Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana )

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/20/kejati-terbitkan-sprindik-baru-dugaan->

[tipikor-bapenda-siapa-tersangkanya](http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/20/kejati-terbitkan-sprindik-baru-dugaan-tipikor-bapenda-siapa-tersangkanya), Di akses 10 November 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c1a0bd9b5e8/fungsi-surat-perintah-penyidikan-28sprindik-29>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, Di akses 13 November 2018.

<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>

<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>, Di akses 11 November 2018.

<https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-kasus-yang-membelit-la-nyalla>, Di akses 11 November 2018.

<http://andika16.blogspot.co.id/2011>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia)

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.